

DAFTAR ISI

	Nomor Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
INTISARI.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II.....	16

TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Aset Kripto	16
B. Tinjauan Umum tentang Mitigasi Risiko TPPU pada Perdagangan Fisik Aset Kripto.....	23
C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana Pedagang Fisik Aset Kripto.....	29
BAB III	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Bahan Penelitian	35
1. Bahan Hukum Primer	35
2. Bahan Hukum Sekunder.....	38
3. Bahan Hukum Tesier.....	38
C. Cara dan Alat Memperoleh Data	38
1. <i>Interview</i>	38
2. Studi Pustaka	40
D. Analisis Data.....	40
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41

A. Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Mitigasi Risiko TPPU pada Perdagangan Fisik Aset Kripto	41
1. Cara Memperoleh, Menyimpan, dan Mengirimkan Aset Kripto	45
2. Perdagangan Aset Kripto pada CEX, DEX, dan Hybrid Exchanges	48
3. Alur Transaksi Aset Kripto pada CEX di Indonesia	56
4. Penyimpanan Data Transaksi Aset Kripto	61
5. <i>Regflags</i> dan Risiko TPPU pada Perdagangan Fisik Aset Kripto	67
6. Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Mitigasi Risiko TPPU oleh Pedagang Fisik Aset Kripto	70
B. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pedagang Fisik Aset Kripto yang Tidak Melakukan Upaya Mitigasi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Penyelenggaraan Perdagangan Fisik Aset Kripto	81
1. Kasus TPPU pada Perdagangan Aset Kripto	86
2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pedagang Fisik Aset Kripto sebagai Pelaku Pasif	93
3. Kajian Perbandingan	106
BAB V	109
PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat:	111

2. Kepada Bappebti:	112
3. Kepada PPATK:	113
4. Kepada Pedagang Fisik Aset Kripto:	113
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR SINGKATAN

ACFE	Association of Certified Fraud Examiners
AHP	Analytical Hierarchy Process
Altcoins	Alternative Coin di Luar Bitcoin
AML	Anti Money Laundering
APU-PPT	Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
BAKTI	Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi
Bappebti	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
BNB	Binance Coin
BTC	Bitcoin
CDD	Customer Due Diligence
CEX	Centralized Exchanges
DEX	Decentralized Exchanges
DLT	Decentralized Ledger Technology
Dukcapil	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
EDC	Electronic Data Capture
EDD	Enhanced Due Diligence
ETH	Ethereum
FATF	Financial Action Task Force
FinCEN	Financial Crimes Enforcement Network
FSB	Financial Stability Board
GoAML	Go Anti Money Laundering
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KYC	Know Your Customer
KYT	Know Your Transaction
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa

LR	Liberty Dollars
M-banking	Mobile Banking
MER	Mutual Evaluation Review
ML	Money Laundering
NRA	National Risk Assessment
NRA ML	National Risk Assessment on Money Laundering
OCR	Optical Character Recognition
OFAC	Office of Foreign Assets Control
P2P	Peer-to-peer
PEP	Politically Exposed Person
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
Regtech	Regulatory Technology
RVP	Receive Versus Payment
TKM	Transaksi Keuangan Mencurigakan
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
USDC	USD Coin
USDT	Tether
UNODC	The United Nations Office on Drugs and Crime
VPI provider	Virtual Payment Instrument

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengaturan Anti TPPU di luar UU TPPU dan Peraturan Bappebti	26
Tabel 2. Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Terdaftar	30
Tabel 3. Perbandingan 3 (Tiga) Jenis Tempat Perdagangan Aset Kripto	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Anjungan Tunai Mandiri (‘ATM’) Bitcoin	43
Gambar 2. Paper Wallet Bitcoin	45
Gambar 3. Mekanisme Perdagangan Fisik Aset Kripto pada CEX	53
Gambar 4. Mekanisme Baru Transaksi Perdagangan Fisik Aset Kripto	55
Gambar 5. Kasus serangan siber ransomware “Wannacry”	84